

Tinjauan Mata Kuliah

Saudara mahasiswa, Mata kuliah IPEM4319 Komunikasi Pemerintahan secara filosofis dapat dipelajari dan dipahami sebagai “proses penyampaian berbagai kebijakan pemerintahan dalam menuntun kehidupan bersama guna mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dunia dan akhirat dengan tidak merugikan pihak manapun secara illegal”. Namun secara prinsip terapan Komunikasi Pemerintahan adalah penyebaran dan pertukaran informasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan yang humanis berpatokan pada aturan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat dielaborasi ke dalam lima sub konsep dan atau sub variabel untuk kemudian dapat diamati dan atau diukur dalam kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang komunikasi pemerintahan mencakup: (1) proses (komunikator); (2) penyampaian berbagai kebijakan pemerintahan (pesan); (3) menuntun kehidupan bersama (komunikasikan/audiens); (4) mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (tujuan/interaksi); (5) dengan tidak merugikan pihak manapun secara illegal (*feedback*/umpan balik).

Secara parsial komunikasi pemerintahan bertujuan untuk mempengaruhi sikap (*attitude change*), perubahan perilaku (*behavior change*), perubahan pendapat (*opinion change*), termasuk untuk melakukan perubahan sosial dalam masyarakat (*social change*). Urgensi komunikasi pemerintahan secara implementatif diprediksi dapat memberikan solusi terhadap distorsi dan friksi maupun fenomena dan anomali yang terjadi dalam penyampaian berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Muaranya adalah untuk percepatan perwujudan transparansi, akuntabilitas dan pencapaian tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUD 1945, sehingga Pembahasan Buku Materi Pokok (BMP) Komunikasi Pemerintahan ini mencakup Sembilan Modul dengan sub judul sebagai berikut.

- Modul 1: mengupas tentang Beberapa Konsep dan Definisi Komunikasi Pemerintahan
- Modul 2: mengupas tentang Paradigma Komunikasi Pemerintahan
- Modul 3: mengupas tentang Etika dan Budaya Kerja Aparatur dalam Komunikasi Pemerintahan
- Modul 4: mengupas tentang Kebijakan dan Strategi Komunikasi Pemerintahan
- Modul 5: mengupas tentang Karakteristik Komunikasi Pemerintahan yang Efektif.
- Modul 6: mengupas tentang Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Pemerintahan
- Modul 7: mengupas tentang Transformasi dan Informasi Komunikasi Pemerintahan
- Modul 8: mengupas tentang Hubungan Internasional Komunikasi Pemerintahan
- Modul 9: mengupas tentang Grand Design Komunikasi Pemerintahan Era Teknologi Digital.

PETA KOMPETENSI Komunikasi Pemerintahan/IPEM4319/ 3 SKS

